

PROFIL DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR (PBA)



Adi Perwira (2010)

DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2011

306

212

P

PROFIL DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR (PBA)



**PROFIL
DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR**

© Copyright
Direktorat Peninggalan Bawah Air
2011

Redaksi

Penanggung Jawab:
Surya Helmi

Ketua:
Lien Dwiari Ratnawati

Sekretaris :
Mery Brillianty

Anggota :
Anggoro Cahyadi
Bambang Cahyono
Bambang Sulistyono
Desse Yussubrasta
Dian Trihayati
Eko Priyanto
Fatwa Yulianto
Harlin Wasyati
Pahadi
Renny Amelia
St. Prabawa Dwi Putranto
Teddy Sukmana



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian peninggalan budaya bawah air, maka kami menyusun buku profil dan rekapitulasi data yang merupakan salah satu upaya untuk mempublikasikan dan menyebarkan informasi data Direktorat Peninggalan Bawah Air (PBA).



Buku ini merupakan profil Direktorat Peninggalan Bawah Air yang juga memuat rekapitulasi data dari tahun 2005-2010. Rekapitulasi tersebut meliputi data perlindungan, eksplorasi, konservasi, pengendalian dan pemanfaatan, beserta dokumentasi dan publikasi. Data-data tersebut seperti kegiatan survei, pengangkatan serta penyelaman, peraturan, peizinan dan proses hukum, data peninggalan bawah air yang menjadi koleksi negara dan yang didistribusikan ke berbagai instansi. Buku ini juga menyajikan data peninggalan bawah air yang dikonservasi dan hasil dokumentasi setiap kegiatan beserta data sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Peninggalan Bawah Air.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menghimpun data sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga Buku Profil dan Rekapitulasi Data Direktorat Peninggalan Bawah Air ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Mei 2011
Direktur Peninggalan Bawah Air.

Surya Helmi



DAFTAR ISI

Judul	1
Redaksi	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Profil Direktorat Peninggalan Bawah Air	6
Visi dan Misi	7
Prakiraan Situs PBA di Indonesia	8
Hasil Survei dan Pemetaan Situs PBA	9
Survei Situs PBA oleh PANNAS BMKT	10
Peningkatan PBA oleh PANNAS BMKT	11
PBA yang Terinventaris	12
PBA yang Menjadi Koleksi Negara	13
PBA Hasil Survei PANNAS BMKT	
PBA Hasil Temuan Nelayan	
Distribusi PBA	14
Jumlah Keseluruhan PBA	15
PBA yang Teridentifikasi dan Terkonservasi	
Peningkatan Kapasitas SDM PBA	16
Jumlah Peselam Pusat dan Daerah	17
SDM Direktorat PBA	18
Penanganan Kasus Pelanggaran PBA	19
Peraturan-peraturan Nasional yang terkait PBA	20
Peraturan-peraturan Internasional yang terkait PBA	23
Kegiatan Pameran dan Sosialisasi PBA	24
Peralatan Penunjang Aktifitas PBA	25
Peralatan Penunjang Konservasi PBA	26
Terbitan PBA	27



PROFIL DIREKTORAT PENINGGALAN BAWAH AIR

Direktorat Peninggalan Bawah Air (PBA) adalah instansi yang mempunyai kewenangan menangani benda hasil budaya masa lalu yang berada di bawah air, termasuk yang berada di sekitar wilayah tersebut. Biasanya benda-benda hasil budaya manusia masa lalu berasal dari kapal-kapal dagang yang tenggelam di perairan Indonesia, baik kapal dagang dari Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, dan Cina.

Selain itu ada juga benda hasil budaya manusia masa lalu yang berada di sekitar wilayah perairan yang menjadi perhatian Direktorat Peninggalan Bawah Air, karena secara kontekstual ada keterkaitan dengan peninggalan bawah air seperti benteng-benteng yang terletak di wilayah pantai atau di pulau-pulau kecil.

Dalam kaitannya dengan upaya penanganan peninggalan Benda Cagar Budaya (BCB) bawah air tidaklah lepas dari maraknya pencurian muatan kapal-kapal karam jaman dahulu yang kemudian dilelang untuk kepentingan komersil. Selain itu adanya penyedotan pasir laut dan pembuatan anjungan minyak lepas pantai turut memberi kontribusi pada kerusakan situs peninggalan bawah air.

Atas dasar tersebut pada tahun 2005 melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.01/MKP-2005, tertanggal 27 Mei 2005, dibentuklah Direktorat Peninggalan Bawah Air yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Direktorat PBA terdiri dari lima Sub Direktorat (subdit) antara lain:

1. Subdit Perlindungan;
2. Subdit Eksplorasi;
3. Subdit Konservasi;
4. Subdit Pengendalian Pemanfaatan; dan
5. Subdit Dokumentasi dan Publikasi.



VISI

"Terwujudnya pemahaman sejarah dan budaya melalui lestarinya/pelestarian Peninggalan Bawah Air (PBA) dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa".

MISI

1. Meningkatkan pelestarian peninggalan bawah air melalui penyiapan produk hukum.
2. Meningkatkan pemahaman sejarah dan budaya yang berkaitan dengan peninggalan bawah air.
3. Meningkatkan prasarana dan sarana.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
6. Meningkatkan peran serta dan kerjasama *stakeholder*.
7. Meningkatkan pelayanan informasi peninggalan bawah air.
8. Meningkatkan pemanfaatan peninggalan bawah air untuk ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan.

Tugas pokok Direktorat PBA adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan peninggalan bawah air untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Direktorat PBA menjalankan fungsi :

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan peninggalan bawah air, untuk kepentingan akademis dan strategis.
2. Mengelola, mengolah, dan menyebarkan hasil kegiatan peninggalan bawah air dalam berbagai sarana dan media.
3. Melatih dan membimbing ketenagaan yang profesional.
4. Menjalin kerjasama berskala lokal, nasional, dan internasional untuk kepentingan pengembangan peninggalan bawah air.
5. Memberikan rekomendasi di bidang pelestarian sumber daya budaya peninggalan bawah air bagi kepentingan, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat di bidang kebudayaan.
7. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria peninggalan bawah air.



PRAKIRAAN JUMLAH SITUS PBA DI INDONESIA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Dokumen VOC	274
2	Dokumen lain (Belanda, Portugis, Cina, dll)	460
3	UNESCO	500



Peta situs PBA berdasarkan interpretasi data dokumen VOC
BRKP, KKP



HASIL SURVEI DAN PEMETAAN SITUS PBA

NO	TAHUN	LOKASI SITUS	KEDALAMAN	TEMUAN
1	2006	Selayar, Sulawesi Selatan	21 m	Kapal Cina
2	2006	Barang Lompo, Sulawesi Selatan	32 m	Kapal Jepang (perang)
3	2007	Pesisir Selatan, Sumatera Barat	22 – 28 m	Kapal besi (perang)
4	2008	Sagori, Buton, Sulawesi Tenggara	7 m	Kapal VOC (kargo)
5	2009	Perairan Pulau Nangka, Bangka Belitung	28 m	Kapal besi
6	2009	Wayame, Teluk Ambon, Ambon	17 – 35 m	Kapal kargo "Aquila"
7	2009	Selat Lembe, Bitung, Sulawesi Utara	20 – 28 m	Kapal perang "Mawali"
8	2009	Halmahera Utara, Maluku Utara	3 - 7 m	Kapal perang "Tosimaru"
9	2009	Tidore, Maluku Utara	50 m	Kapal besi
10	2010	Perairan Pulau Genting, Karimunjawa	2 m	Persebaran keramik
11	2010	Perairan Seruni, Karimunjawa	10 m	Kapal besi
12	2010	Perairan Kemojan, Karimunjawa	15 m	Kapal kargo "Indonor"
13	2010	Perairan Pulau Parang, Karimunjawa	34-38 m	Kapal kayu (kargo)
14	2010	Perairan Kumbang, Karimunjawa	2-13 m	Kapal besi (kargo)
15	2010	Perairan Taka Mnyawakan, Karimunjawa	3-9 m	Kapal besi
16	2010	Perairan Geleang, Karimunjawa	48 m	Kapal kayu (kargo)
17	2010	Perairan Menjangan Kecil, Karimunjawa	28-30 m	Kapal kayu (kargo)



SURVEI SITUS PBA OLEH PANNAS BMKT

NO	TAHUN	LOKASI
1	2004	Perairan Tegal, Jawa Tengah
2*	2004	Perairan Cirebon, Jawa Barat
3*	2005	Teluk Sumpat, Bintan Utara
4	2005	Perairan Natuna, Kepulauan Seribu
5	2005	Perairan Maspari, Sumatera Selatan
6	2006	Perairan Selayar, Sulawesi Selatan
7	2007	Karang Baginda, Bangka Selatan
8	2007	Perairan Karimata , Kalimantan Barat
9	2008	Karang Baginda, Bangka Selatan
10	2008	Tanjung Menjangan, Sumatera Selatan
11	2008	Pantai Cermin, Sumatera Utara
12	2008	Perairan Belitung Timur, Belitung
13*	2008	Perairan Mandalika, Jepara Jateng
14*	2008	Perairan Kerawang, Jawa Barat
15	2009	Selat Gelasa, Bangka Belitung
16	2009	Perairan Subang, Jawa Barat
17	2010	Perairan Bangka Belitung

Keterangan *)

Kegiatan survei yang dilanjutkan dengan pengangkatan



PENGANGKATAN PBA OLEH PANNAS BMKT

NO	TAHUN	LOKASI
1	2004	Perairan Cirebon, Jawa Barat
2	2005	Teluk Sumpat, Kepulauan Riau
3	2005	Perairan Karang Heluputan, Kepulauan Riau
4	2007	Perairan Mandalika, Jepara Jawa Tengah
5	2008	Perairan Mandalika, Jepara Jawa Tengah
6	2008	Perairan Kerawang, Jawa Barat
7	2009	Perairan Belitung Timur, Bangka Belitung
8	2010	Perairan Pamanukan, Jawa Barat



Pengangkatan di Perairan Pamanukan



PBA YANG TERINVENTARIS

NO	ASAL	JUMLAH*	TEMPAT
1	Pulau Buaya, Kep. Riau	16.031	Cileungsi, Bogor
2	Batu Hitam, Belitung dan Tuban	10.757	Cileungsi, Bogor
3	Pulau Seribu (Eks Intan Cargo)	664	Galeri Nasional, Jakarta
4	Perairan Blanakan	13.590	Sawangan, Depok
5	Selat Karimata (Karang Cina)	31.029	Sawangan, Depok
6	Perairan Laut Jawa, utara Cirebon	271.834	Pamulang, Tangerang Selatan
7	Perairan Karang Heliputan, Kep. Riau	21.521	P. Bintan, Kep. Riau
8	Perairan Teluk Sumpat, Kep. Riau	15.461	P. Bintan, Kep. Riau
9	Perairan Laut Jawa, utara Karawang	14.814	Jepara
10	Perairan Laut Jawa, utara Karawang	6.442	Lodan, Jakarta
11	Perairan Belitung Timur	34.680	Lodan, Jakarta
12	Perairan Ujung, Pamanukan	18.469	Sunter
13	Selat Gelasa, Bangka Belitung (Swanda)	32.150	Galeri Nasional, Jakarta
14	Jepara, Jawa Tengah (MSO)	328	Galeri Nasional, Jakarta
	Jumlah	487.770	

*) Jumlah PBA berdasarkan laporan akhir perusahaan pengangkat.



PBA YANG MENJADI KOLEKSI NEGARA

NO	ASAL	JUMLAH	TEMPAT
1	Cirebon, Laut Jawa	976	Senayan
2	Pulau Buaya, Kepulauan Seribu	52	Senayan
3	Teluk Sumpat	149	Senayan
4	Karang Heliputan	373	Senayan
5	Intan Cargo, Kepulauan Seribu	664	Gambir
	Jumlah	2.214	

PBA HASIL SURVEI PANNAS BMKT

NO	ASAL	JUMLAH
1	Selayar	11
2	Karawang	11
3	Mandalika, Jepara	14
4	Cirebon	14
5	Banten	1
6	Karimata	10
7	Selat Gelasa	6
8	Belitung Timur	8
9	Karang Baginda	13
10	Pamanukan, Laut Jawa	10
11	Perairan Bangka	33
	Jumlah	131

PBA HASIL TEMUAN NELAYAN

NO	ASAL	JUMLAH
1	Sumenep, Madura	21
2	Kerawang	1
3	Laut Jawa	18
4	Pulau Sabira, Kep. Seribu	2
5	Subang, Jawa Barat	8
	Jumlah	50

DISTRIBUSI PBA

NO	TAHUN	TUJUAN	JUMLAH
1	2006	BPSNT Padang	100
2	2006	Museum Adityawarman, Padang	101
3	2006	BP3 Batu Sangkar	101
4	2007	Jurusan Arkeologi, UGM	100
5	2007	Departemen Arkeologi UI	100
6	2007	Museum Kabupaten Belitung	100
7	2007	Museum Siwa Lima, Ambon	97
8	2007	Dinas Budpar Provinsi Jambi	100
9	2008	Museum Prop. Sumatera Utara	125
10	2008	Balar Medan	124
11	2008	Jurusan Arkeologi UNHAS	124
12	2008	Museum Kabupaten Belitung	1000
13	2008	Pemda Wakatobi, Sulawesi Tenggara	100
14	2009	Museum Kabupaten Belitung	2000
15	2009	Jurusan Arkeologi UNUD	25
16	2010	Departemen Arkeologi UI	25
17	2010	Fak. Sastra UNUD	85
18	2010	BPSNT Bali	45
19	2010	Balai Taman Nasional Kep. Seribu	49
20	2010	Balar Bandung	116
21	2010	Balai Konservasi Peninggalan Borobudur	34
22	2010	Balar Ambon	100
23	2010	Museum Nasional	52
24	2010	Balai Konservasi Peninggalan Borobudur	117
25	2010	Muskala Jarahnitra Disbudpora Cirebon	100
26	2010	Museum Ranggawarsito, Jawa Tengah	100
27	2010	Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional	100
28	2010	Museum Bahari	100
		Jumlah	5.320



JUMLAH KESELURUHAN PBA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Terinventaris	487.770
2	Koleksi Negara	2.214
3	Hasil Survei PANNAS BMKT	131
4	Temuan Nelayan	50
	Sub jumlah	490.165
5	Didistribusikan	5.320
	Jumlah (-)	484.845

PBA YANG TERIDENTIFIKASI DAN KONSERVASI

NO	URAIAN	TAHUN	JENIS	JUMLAH	Total
1	Teridentifikasi	2009	Keramik,dll	1.498	
2	Terkonservasi	2009	Keramik	901	
		2010	Keramik	902	
		2010	Logam	100	1903



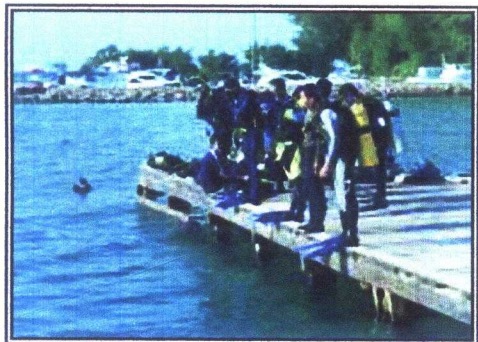
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PBA

NO	TAHUN	KEGIATAN	PESERTA
1	2006	Sertifikasi selam	26
2	2007	Ekskavasi arkeologi bawah air	27
3	2008	Fotografi bawah air (fotomozaik)	20
4	2008	Konservasi bcb bawah air tingkat dasar	25
5	2009	Fotografi bawah air (aplikasi)	15
6	2009	Identifikasi kapal	15
7	2010	Sertifikasi selam	16
8	2010	Konservasi bcb bawah air tingkat lanjut	25



Diklat Konservasi di Balai
Konservasi Peninggalan Borobudur

Diklat Selam di Kepulauan
Seribu



JUMLAH PESELAM PUSAT DAN DAERAH

No	INSTANSI	★1	★2	★3	JUMLAH
1	Direktorat PBA	10	7	-	17
2	BP3 Serang	-	1	1	2
3	BP3 Aceh	1	-	-	1
4	BP3 Batusangkar	3	5	1	9
5	BP3 Jambi	3	5	-	8
6	BP3 Jawa tengah	4	2	-	6
7	BP3 DIY	-	3	-	3
8	BP3 Jawa Timur	2	1	1	4
9	BP3 Bali	3	2	-	5
10	BP3 Makassar	10	1	1	12
11	BP3 Gorontalo	1	-	1	2
12	BP3 Ternate	2	-	1	3
13	Balar DIY	-	3	1	4
14	Balar Medan	-	2	1	3
15	Balar Palembang	1	4	-	5
16	Balar Banjarmasin	1	-	-	1
17	Balar Manado	-	1	-	1
	Total	41	37	8	86



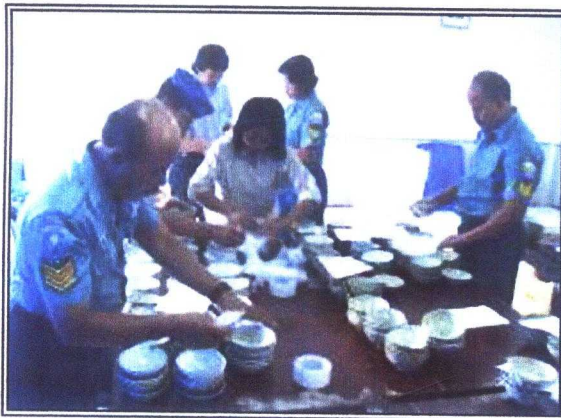
SDM DIREKTORAT PBA

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	S2 Arkeologi	5
2	S2 Museologi	2
3	S2 Hukum	1
4	S2 Manajemen	1
5	S1 Arkeologi	8
6	S1 Antropologi	1
7	S1 Hukum	1
8	S1 Administrasi Negara	1
9	S1 Administrasi Niaga	1
10	S1 Kimia	2
11	S1 Biologi	1
12	S1 Ekonomi	2
13	SMA	13
14	STM	2
15	SMP	1
16	SD	1
	Jumlah	43



PENANGANAN KASUS PELANGGARAN PBA

NO	TAHUN	PELANGGARAN	PENANGANAN
1	2005	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Taman Nasional Ujung Kulon	Pelaku divonis 6 bulan
2	2005	Pengambilan sampel PBA tanpa ijin di perairan Cirebon	Penyidikan dihentikan Dilanjutkan tahun 2008
3	2006	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Kalimantan Barat	Tahap gelar perkara
4	2006	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Belitung	Pelaku divonis 4 bulan
5	2006	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Cirebon	Penerbitan SP3
6	2007	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Jepara	Penyidikan
7	2008	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Makassar	Penyidikan
8	2008	Pengambilan sampel PBA tanpa ijin di perairan Taman Nasional Kepulauan Pulau Seribu	Penyidikan
9	2008	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Selayar, Sulawesi Selatan	Penyidikan
10	2010	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Blanakan, Cirebon oleh nelayan	Penyidikan
11	2010	Pengambilan PBA tanpa ijin di perairan Blanakan, Cirebon oleh Michael Hatcher	Surat cekal terhadap Michael Hatcher



Pemeriksaan Barang Bukti Kasus Blanakan, Cirebon

PERATURAN-PERATURAN NASIONAL TERKAIT PBA

NO	NAMA PERATURAN	KETERANGAN
1	UU RI No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut)	Memberlakukan ketentuan UNCLOS 1982, dimana diatur mengenai <i>Protection of Archaeological and Historical Objects</i>
2	UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pemanfaatan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut untuk kepentingan budaya.
4	UU RI No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia.
5	UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai budaya.
6	UU RI No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pengaturan mengenai kawasan cagar budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan budaya.
7	UU RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Pengaturan mengenai kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek budaya.
8	UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek budaya.
9	UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Mengatur mengenai kawasan konservasi perairan untuk kepentingan kebudayaan.
10	UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya.
11	PP RI No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rencana pengelolaan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa disusun berdasarkan kajian aspek-aspek budaya.
12	PP RI No 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing	Perizinan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing terhadap budaya.
13	PP RI No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan	Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi, dan

	Daerah Kabupaten/Kota	pemerintahan kabupaten/kota mengenai kebudayaan.
14	PP RI No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengaturan kawasan strategis dari sudut kepentingan budaya.
15	Keppres RI No 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Antara Pemerintah dan Perusahaan	BMKT yang mempunyai nilai benda cagar budaya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang untuk diperjual belikan dan harus diserahkan kepada Negara.
16	Keppres RI No 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing	Pengaturan untuk tenaga asing baik secara perorangan maupun kelompok yang ingin melakukan penelitian budaya.
17	Inpres RI No 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	Instruksi kepada Menteri, LPND, Kepolisian, Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
18	Keppres RI No 19 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Panitia nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam	BMKT yang memenuhi unsur-unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang benda cagar budaya, dinyatakan menjadi milik negara.
19	Kepmen Diknas No 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya	Mengenai pendaftaran Benda Cagar Budaya.
20	Kepmen Diknas No 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs	Mengenai Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
21	Kepmen Diknas No 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya	Mengenai Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya.
22	Kepmen Diknas No 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs	Mengenai Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs.
23	Kepmen KP selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam	Mengenai persyaratan survei dan pengangkatan Benda Cagar Budaya/BMKT.
24	Permen Budpar No: PM.48/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air	Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengelolaan peninggalan bawah air, meliputi: a. perlindungan b. survei peninggalan bawah air c. pemeliharaan dan konservasi d. dokumentasi dan publikasi e. pengendalian dan pemanfaatan

25	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 dan No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan	Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melestarikan kebudayaan bangsa.
26	Permen Keu No. 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/China dan Benda Cagar Budaya	Dalam rangka pengelolaan kekayaan yang dikuasai Negara, perlu diketahui nilai kekayaan yang dikuasai Negara berupa Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.



PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL TERKAIT PBA

NO	NAMA PERATURAN	KETERANGAN
1	<i>Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of armed Conflict, 1954</i>	Diratifikasi dengan Keppres No 234 Tahun 1996, mengatur mengenai perlindungan benda budaya pada waktu perang
2	<i>Convention on the Means of prohibiting and preventing the Illicit Import, Eksport and Transfer of Ownership of Cultural Property, 1970</i>	Belum diratifikasi, Konvensi ini menjadi dasar prinsip hukum perlindungan benda budaya menghadapi pencurian dan perdagangan ilegal.
3	<i>Recommendation Concerning the Protection of Movable Cultural Property, 1978</i>	Belum diratifikasi, mengenai perlindungan benda-benda budaya bergerak
4	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982</i>	Diratifikasi dengan UU No 17 Tahun 1985, mengatur mengenai <i>Archaeological and historical objects</i>
5	<i>UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, 1995</i>	Belum diratifikasi, mengatur mengenai pencurian dan ekspor obyek budaya ilegal
6	<i>International Charter on the Protection and Management of Underwater Cultural Heritage, 1996</i>	Belum diratifikasi, mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan warisan budaya bawah air
7	<i>Asean on Declaration on Cultural Heritage, 2000</i>	Telah disepakati, mengatur mengenai perlindungan terhadap kebudayaan dan peninggalan budaya di negara ASEAN
8	<i>Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, 2001</i>	Belum diratifikasi, mengatur mengenai warisan budaya bawah air
9	<i>Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Sociation of South East ASIAN Nations and the People's Republic of China, 2002</i>	Negara dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi keamanan nasionalnya atau melindungi hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, sejarah dan nilai arkeologi, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk perlindungan moral masyarakat, atau perlindungan manusia, budaya lokal



KEGIATAN PAMERAN DAN SOSIALISASI PBA

NO	TAHUN	LOKASI	JENIS KEGIATAN
1	2006	Jakarta (Sapta Pesona)	Pameran
2	2007	Jakarta (Sapta Pesona)	Pameran
3	2007	Jakarta (Hotel Sahid)	Pameran
4	2007	Jakarta (Sapta Pesona)	Pameran
5	2008	Jakarta (Museum Kebangkitan Nasional)	Pameran & Sosialisasi
6	2008	Palembang (Museum Sriwijaya)	Pameran & Sosialisasi
7	2008	Makassar (Benteng Rotterdam)	Pameran & Sosialisasi
8	2008	Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Pameran
9	2008	Gresik, Jawa Timur	Pameran
10	2008	Jakarta (Sapta Pesona)	Pameran
11	2009	Manado, Sulawesi Utara	Pameran
12	2009	Pekalongan, Jawa Tengah	Pameran
13	2009	Karawang, Jawa Barat	Pameran & Sosialisasi
14	2009	Rembang, Jawa Tengah	Pameran & Sosialisasi
15	2009	Belitung	Pameran & Sosialisasi
16	2009	Jakarta (Sapta Pesona)	Pameran
17	2010	Kepulauan Seribu	Pameran & Sosialisasi
18	2010	Ambon	Pameran
19	2010	Indramayu, Jawa Barat	Pameran
20	2010	Bangka	Pameran & Sosialisasi
21	2010	Jakarta (Sapta Pesona)	Pameran



PERALATAN PENUNJANG AKTIFITAS PBA

NO	JENIS DAN MEREK	JUMLAH
1	Tabung Selam	13
2	Regulator	15
3	BCD (Buoyancy Compensator Device)	16
4	Masker dan Snorkel	13
5	Fin	15
6	Wetsuit	9
7	Jam Selam (Dive Computer Nemo Sport)	8
8	Video + Casing	
	a. Sony TR V 240E	1
	b. Sony PC 108E	1
9	Camera + Casing	
	a. Nikonos V	2
	b. Nikon SLR	1
10	GPS Hand (Garmin Rino, Map 178, Map 240)	12
11	Echo Sounder Ray Marine	1
12	Underwater Scooter SEA D00	2
13	Magnetometer	1
14	Compressor	1
15	Mask Communicator	2



PERALATAN PENUNJANG KONSERVASI PBA

NO	JENIS DAN MEREK	JUMLAH
1	Salinometer	1
2	Ultrasonik Cleaner	1
3	pH meter	1
4	Ultraviolet	1
5	Pompa Sirkulasi Air	1
6	Genset	1
7	Power Supply	1
8	Water Pump	1



TERBITAN PBA

NO	TAHUN	JUDUL	JENIS
1	2006	Pedoman Pengelolaan PBA	Pedoman
2	2006	Silabus Dit. PBA	Pedoman
3	2006	VARUNA Volume 1	Jurnal
4	2007	VARUNA Volume 2	Jurnal
5	2007	Katalog PBA di Indonesia	Katalog
6	2007	Perawatan dan Pengawetan Koleksi PBA	Pedoman
7	2007	Ekskavasi PBA	Booklet
8	2008	VARUNA Volume 3	Jurnal
9	2009	VARUNA Volume 4	Jurnal
10	2009	Kumpulan Pedoman Pengelolaan PBA	Pedoman
11	2010	VARUNA Volume 5	Jurnal
12	2010	Pedoman Penetapan Situs PBA	Pedoman



Per
Je